

**SKRIPSI**

**URGENSI PENGATURAN TENTANG SYARAT PEMBERIAN  
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA ERA  
PANDEMI *COVID-19* MENURUT PERMENKUHAM NOMOR 10 TAHUN**

**2020**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**



Oleh:

**GERRY KURNIA DICHI**

**1610111112**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)**

Pembimbing :

Dr, Aria Zurnetti,S.,H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**URGENSI PENGATURAN TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI  
DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA ERA PANDEMI *COVID-19*  
MENURUT PERMENKUHAM NOMOR 10 TAHUN 2020**

(Gerry Kurnia Dichi, 1610111112, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 89 halaman, Tahun 2021)

Dosen Pembimbing: Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H., dan Riki Afrizal, S.H., M.H.,

**ABSTRAK**

Pada masa pandemi *Covid-19* pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dengan alasan kemanusiaan, melihat kondisi lapas yang kelebihan kapasitas akan menyulitkan untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga akan beresiko atas keselamatan narapidana dan anak. Kebijakan pemerintah melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* ini mendapat banyak perhatian publik, beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan *Covid-19*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, *Pertama*, apakah urgensi pengaturan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana pada era *Covid-19* menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. *Kedua*, bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era *Covid-19* menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan yang didapatkan kemudian diolah secara sistematis dan dikaitkan dengan permasalahan. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwasannya pentingnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas di lapas. Kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi ini dapat mencegah serta menanggulangi penyebaran dan penularan *Covid-19* di lapas yang kelebihan penghuni, telah berdampak untuk menekan angka kondisi kelebihan penghuni hingga 30%. Namun disamping tercapainya tujuan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tersebut dilihat dari sisi tujuan pemidanaan yang didapatkan narapidana dan anak tidak optimal dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi ini. Serta pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era *Covid-19* dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang pelaksanaannya dilaksanakan secara daring tentu berbeda sebelum adanya pandemi, terihat pemerintah terkendala dalam implementasinya baik itu dari segi sumber daya manusia dari bapas selaku pengawas tentu dari narapidana juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk prosesnya.

**Kata kunci** : Hak Asasi Manusia, Narapidana, Asimilasi, *Covid-19*, Pengawasan, Pemasarakatan.